

# ANALISIS PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI INDONESIA

Oleh:  
**Warda Harahap & Nasri Bachtiar**  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan periode waktu pengamatan tahun 2008-2013. Alat analisa data yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian secara parsial dengan uji t-Statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel upah berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Indonesia.

**Keywords:** *Pengangguran Terdidik, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Fixed Effect Model.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tahun 2015 Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan *ASEAN Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan

tertentu. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 1997). Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Pengaruh kondisi jumlah penduduk yang mempunyai kualitas yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang mempunyai kualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM). Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia. Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan namun di lain pihak dihadapkan dengan berbagai masalah khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti pengangguran.

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Nanga (2001), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS).

Masalah lain pada bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi. Sukirno (2006) menyimpulkan bahwa "Pembangunan perekonomian memerlukan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian, pelaksana pemodern tersebut juga harus ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja terdidik". Nyatanya yang terjadi saat ini, pengangguran lebih didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) yang seharusnya tenaga kerja terdidik menjadi *human investment* bagi suatu negara.

Menurut Mankiw (2003), pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA ke atas. Pengangguran terdidik merupakan sebuah keadaan dimana tenaga kerja terdidik mengalami kondisi sulit untuk mendapatkan pekerjaan, alasannya bukan karena tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka, namun karena tenaga kerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan menengah ke atas akan lebih memilih menunggu

waktu (menganggur) dari pada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, hal ini berkaitan dengan upah yang diterima. Dari segi ekonomis, pengangguran terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran kurang terdidik jika ditinjau dari kontribusi yang gagal diterima di lapangan kerja.

Dunia pendidikan tidak selalu paralel dengan realitas dunia kerja. Kesenjangan ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia. Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa lulusan SMA menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran terdidik di Indonesia selama periode 2010-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pengangguran terdidik adalah sebesar 2,40 persen sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,31 persen. Pengangguran terdidik bukan hanya menjadi masalah pokok dan tanggung jawab pemerintah pusat, terlebih setelah dilaksanakannya otonomi daerah. Sehingga, pengangguran terdidik sekarang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tingkat pengangguran terdidik di setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang menentukan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah dan lain-lain.

Menurut Rizka (2015), salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun jelas menurunkan jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan keadaan seperti ini, maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga pengangguran akan semakin meningkat. Pengangguran yang

dipengaruhi oleh daya beli masyarakat menyebabkan adanya hubungan dengan inflasi, karena inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, Sukirno (2008) menyimpulkan bahwa “Inflasi merupakan proses kenaikan pada harga-harga barang secara umum, maka tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan mendorong jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja”.

Selain dari inflasi, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB mencerminkan keadaan perekonomian disuatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi didaerah yang bersangkutan. Semakin tinggi perekonomian disuatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat didaerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Selain itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan adanya

peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu kesejahteraan penduduk juga akan semakin meningkat.

Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaantingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang yang setiap orang berbeda dalam kemampuan dan kontribusinya bagi pendapatan yang diterimanya. Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar. Selain itu perbedaan wilayah atau daerah pun menjadi penyebab perbedaan tingkat upah. Wilayah yang mempunyai pendapatan daerah yang tinggi tentu akan menciptakan efek pendapatan bagi tenaga kerja karena banyaknya perusahaan yang berkembang di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam penelitian ini dengan judul: “ **Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.**”

#### **Rumusan Masalah**

Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta jiwa, jumlah ini bertambah 320 ribu jiwa dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 yakni sebesar 7,24 juta jiwa. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh SMK sebesar 12,65 persen, disusul SMA sebesar 10,32 persen, Diploma sebesar 7,54 persen,

Sarjana sebesar 6,40 persen, SMP sebesar 6,22 persen, dan SD ke bawah sebesar 2,74 persen (BPS). Sementara itu jumlah angkatan kerja meningkat sedangkan daya serap tenaga kerja dari beberapa industri melemah. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 bertambah 510 ribu jiwa menjadi 122,38 juta jiwa, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014 yaitu sebanyak 121,87 juta jiwa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas maka diambil beberapa pertanyaan agar penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa “Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berumur minimal 15 tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang atau jasa.” Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1990.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja :

#### 1. Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa “Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.”

#### 2. Bukan Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

#### 2.1.1 Pasar Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2009) bahwa “Pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja.” Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja

dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini memiliki pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar (Santoso, 2012).

##### a) Permintaan Tenaga Kerja (*Demand Of Labor*)

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan keduanya biasanya bersifat negatif. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan barang atau jasa (Santoso, 2012). Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Sumarsono, 2009).

##### b) Penawaran Tenaga Kerja (*Supply Of Labor*)

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus, akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2009).

##### c) Pasar Tenaga Kerja Terdidik dan Pasar Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar tenaga kerja yang membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu

yang lama serta biaya pendidikan yang cukup besar. Sedangkan pasar tenaga kerja tidak terdidik merupakan pasart tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus, seperti pendidikan dan keterampilan (Sumarsono, 2009).

## **2.2 Definisi Pengangguran**

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

### **2.2.1 Klasifikasi Pengangguran**

Menurut Lipsey (1997), pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangguran siklis, pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran siklis adalah penganggur yang terjadi karena permintaan yang tidak memadai untuk membeli semua potensi keluaran ekonomi, sehingga mengakibatkan senjang resesi dimana keluaran aktual lebih kecil dari keluaran potensial. Kelompok penganggur ini juga dikatakan sebagai orang yang menganggur dengan terpaksa, dengan kata lain mereka ingin bekerja dengan tingkat upah yang berlaku tetapi pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia.

Pengangguran struktural mengacu kepada pengangguran yang disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja

berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan akan tenaga kerja (Lipsey, 1997). Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Para pekerja yang tidak dipekerjakan bukan karena mereka aktif untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, namun pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya (Mankiw, 2000).

Sedangkan pengangguran friksional diakibatkan oleh perputaran normal tenaga kerja. Sumber penting pengangguran friksional adalah orang-orang muda yang memasuki angkatan kerja dan mencari pekerjaan (Lipsey, 1997). Menurut Mankiw (2000), pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Para ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan antar wilayah sebagai pergeseran sektoral. Perubahan dalam komposisi permintaan diantara industri atau wilayah selalu terjadi dan karena perlu waktu untuk mengubah sektor maka pengangguran friksional selalu muncul.

### **2.2.2 Faktor Penyebab Pengangguran**

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran menurut Mankiw (2000) ialah sebagai berikut:

#### **A. Kekakuan Upah**

Kekakuan upah berarti gagal nya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu

fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat kliring pasar atau tingkat ekuilibrium sehingga terjadi pengangguran.

Saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka para perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2000).

#### B. Pencarian Kerja

Salah satu alasan mengapa pengangguran selalu ada dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Salah satu program pemerintah yang meningkatkan jumlah pengangguran friksional, meskipun tidak disengaja, adalah tunjangan pengangguran. Atau tunjangan pengangguran adalah program pemerintah yang secara parsial menjamin pendapatan pekerja pada saat mereka menganggur. Program ini bertujuan untuk memberikan kompensasi parsial bagi pekerja akibat kehilangan pekerjaan.

#### C. Peraturan Upah Minimum

Jika upah di pertahankan di atas titik keseimbangan karena segala alasan maka hasilnya adalah pengangguran. Peraturan upah minimum adalah salah satu alasan mengapa upah menjadi terlalu tinggi. Apabila pencari kerja menjadi alasan terjadinya pengangguran, para pekerja mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada di atas titik keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan, dan para

pekerja menjadi pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan pekerjaan.

#### D. Serikat Pekerja dan Tawar-menawar Kolektif

Serikat kerja (*Union*) adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja mengenai upah dan kondisi kerja. Serikat kerja merupakan sejenis kartel. Serikat kerja merupakan sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses di sepakatinya syarat-syarat kerja antara serikat kerja dan perusahaan. Dan pemogokan adalah penarikan pekerja dari perusahaan yang di adakan oleh serikat pekerja.

#### E. Teori Upah Efisiensi

Alasan lain mengapa pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian selain pencarian kerja, peraturan upah minimum, dan serikat pekerja, di jelaskan oleh teori upah efisiensi. Menurut teori ini, perusahaan-perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja.

### 2.2.3 Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik digolongkan dalam pengangguran struktural, hal ini disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan akan tenaga kerja (Lipsey, 1997). Pengangguran sendiri tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah, namun pengangguran saat ini juga

dialami oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yaitu lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi. Hal tersebut mencerminkan kemerosotan produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia.

Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja, hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik. Disisi lain, para pengangguran terdidik mempunyai tingkat aspirasi yang tinggi seperti lebih memilih pekerjaan yang mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan kedudukan, dan langsung mendapatkan gaji besar.

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para pengangguran terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah keatas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur.

Menurut Badan Pusat Statistik bahwa “Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerjayang berpendidikan SLTA, Sarjana Muda, atau Sarjana (sebagai kelompok terdidik) yang tidak bekerja.” Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah salah satu masalah makro ekonomi, adapun faktor-faktor penyebab tenagakerja terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, yaitu krisis ekonomi, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenagakerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, dan jumlahangkatan kerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja.”

Menurut Rahmawati dan Hadiwiyono dalam Astuti (2014) bahwa factoryang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik adalah :

- a. Adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan,
- b. Kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering tertutup,
- c. Perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum berfungsi sebagaimana mestinya,
- d. Adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri.

### 2.3 Konsep Inflasi

Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Inflasi karena kenaikan permintaan agregat sering disebut dengan *demand pull inflation*, sedangkan inflasi karena penurunan penawaran agregat sering disebut dengan *cost push inflation* (McEachern, 2000).

Menurut Prasetyo (2009), inflasi dapat digolongkan berdasarkan tingkat parah dan tidaknya dilihat dari berbagai tingkatan, yaitu :

- a. Inflasi Ringan (kurang dari 10 persen per tahun)
- b. Inflasi Sedang (antara 10 persen sampai 30 persen per tahun)
- c. Inflasi Berat (antara 30 persen sampai 100 persen per tahun)
- d. *Hiperinflasi* (lebih dari 100 persen per tahun)

Sedangkan menurut asalnya dapat dibagi menjadi dua yaitu (Prasetyo, 2009) :

- a. Inflasi dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi jenis ini dapat disebabkan karena perilaku konsumtif masyarakat atau pamer kekayaan, sehingga harga-harga barang menjadi naik.

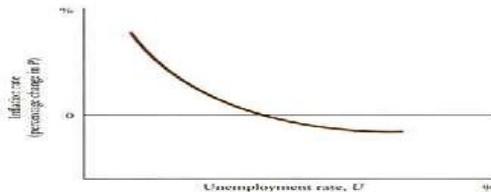
b. Inflasi dari luar negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi yang berasal dari luar negeri ini pada umumnya dapat terjadi karena adanya kelangkaan sumber daya secara umum yang terjadi diluar negeri.

### 2.3.1 Teori A.W. Philips

Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an. A.W. Philips di dalam tulisannya dengan judul *The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of money Wage rate in the United Kingdom*. Studi yang dilakukan A.W Philips mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran pada para pekerja di Inggris pada tahun 1957–1986. Hasil studi membuktikan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran.

**Gambar 2.1**  
**Kurva Philips**



*Sumber: Case and Fair (2008)*

Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. Hasil studi Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus ada *trade off*. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

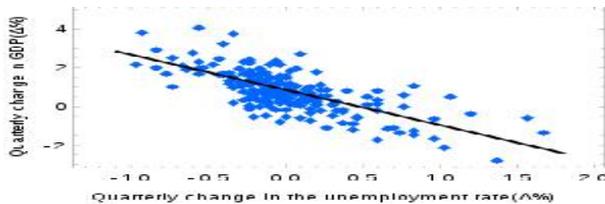
### 2.4 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan domestik bruto tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Menurut Todaro (2004) bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya faktor produksi. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan factor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.” PDB merupakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. PDB dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena PDB merupakan nilai tambah yang terefleksi dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu negara (Mankiw, 2008).

#### 2.4.1 Okun's Law

Hukum Okun menyelidiki hubungan statistik antara tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Penelitian dilakukan Profesor dan Ekonom Yale, Arthur Okun yang mempublikasikan penemuannya pada tahun 1960-an. Hukum Okun menjelaskan berapa banyak dari produk domestik bruto negara (PDB) mungkin akan hilang saat tingkat pengangguran di atas tingkat alamiah. Output yang dihasilkan tergantung kepada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, hal tersebut menunjukkan hubungan positif antara output dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para penawar kerja (pencari kerja). Pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi serta keterbatasan kesempatan kerja akan mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja sama dengan angkatan kerja dikurangi pengangguran, sehingga terjadi hubungan negatif antara output dan pengangguran.

**Gambar 2.2**  
**Kurva Okun**



Sumber: Mankiw (2003)

Menurut Mankiw (2006), Hukum Okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (*Okun's law*) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen.

#### 2.5 Upah

Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima uang yang diterima pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga fisik/mental pekeja yang digunakan dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang/jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja (Sukirno, 2006). Menurut Simanjuntak (1998), dalam suatu usaha atau industri terjadinya pengurangan atau penambahan tenaga kerja dapat disebabkan oleh: pertama, pekiraan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha akibat dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 unit yaitu:

$$VMPP = MPPLXP \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

VMPP : Value Marginal Physical Product of Labor

MPPL : Marginal Physical Product of Labor

Tingkat upah rill adalah tingkat upah nominal dibagi dengan tingkat harga konsumen. Upah rill mengukur jumlah output rill yang harus dibayar perusahaan kepada setiap pekerja. Karena dengan mengupah tenaga kerja menghasilkan kenaikan output sebesar MPPL dan biaya perusahaan atas upah rill. Oleh karena itu, pengusaha akan menambah tenaga kerja selama MPPL melebihi upah rill. Dengan kata lain pengusaha akan menambah tenaga kerja selama MR lebih besar dari MC dan keuntungan yang maksimum yang akan diperoleh pengusaha adalah saat MR=MC yang dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$MR=MC=w \dots\dots\dots(2)$$

$$MPPL=w/P$$

Dimana:

W : tingkat upah nominal

w/P : tingkat upah rill

### 2.5.1 Teori Upah

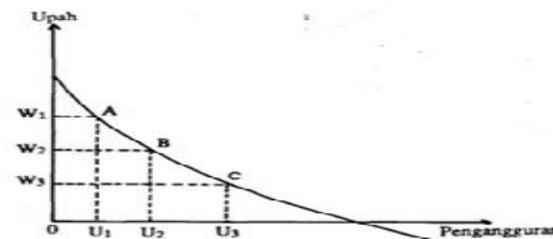
Teori inflasi, A.W. Phillips berhasil menemukan hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan tingkat perubahan upah nominal. Penemuannya ini diperolehnya dari hasil pengolahan data empirik perekonomian Inggris untuk periode 1861-1957. Kurva Phillips yang menghubungkan persentase perubahan tingkat upah nominal dengan tingkat pengangguran seperti diuraikan di atas biasa disebut dengan kurva Phillips dalam bentuk asli. Di samping itu, ada juga kurva Phillips dalam bentuk versi baru yang biasa disebut dengan kurva

Phillips yang sudah direvisi yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Argumentasi untuk menjelaskan kurva phillips di atas dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Laju inflasi} = \text{Tingkat kenaikan upah} - \text{Tingkat kenaikan produktivitas.}$$

**Gambar 2.3**  
**Hubungan Upah dan Pengangguran**



Sumber: Case and Fair (2008)

Kurva tersebut menggambarkan adanya hubungan negatif antara laju inflasi dengan pengangguran: Laju inflasi tinggi, pengangguran rendah (dan output tinggi). Akan tetapi kebalikannya juga justru dapat terjadi yakni kenaikan harga-harga secara umum, yang dilihat dari laju inflasi akan menurunkan output (produksi nasional) dan dengan sendirinya meningkatkan pengangguran.

Tingginya angka inflasi selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Kalau tidak, rakyat tidak lagi mampu membeli barang-

barang yang diproduksi. Jika barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli maka akan banyak perusahaan yang berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka perusahaan akan berusaha untuk mereduksi *cost* sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja/buruhnya dengan mem-PHK para buruh.

Dari kurva Phillips dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi harapan inflasi akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber

Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomidan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia Tahun 2008-2013”, dalam menyusun penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi data tingkat pengangguran terdidik, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah.

### 3.2Metode Analisis

#### 3.2.1 Analisis *Polled Data*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak

mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja. Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode *Pooled Least Square* (*Common Effects*), metode efek tetap (*Fixed Effects*) dan metode efek acak (*Random Effects*).

#### 3.2.2 Spesifikasi Model Regresi

Model ini mengacu kepada model dari penelitian Rizka Febrina (2015). Bentuk umum dari model regresi data panel dalam penelitian adalah :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it} \dots (1)$$

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini melakukan modifikasi dengan menambahkan  $\ln$  untuk menyamakan parameter sehingga model menjadi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it} \dots (2)$$

Dimana :

- Y : Pengangguran Terdidik (dalam satuan persen)
- X1 : Inflasi (dalam satuan persen)
- X2 : Pertumbuhan Ekonomi (dalam satuan milyar rupiah)
- X3 : Upah (dalam satuan rupiah)
- 0 : Konstanta
- 1 : Koefisien Regresi X1 (inflasi)
- 2 : Koefisien Regresi X2 (pertumbuhan ekonomi)

- 3 : Koefisien Regresi X3 (upah)
- i : Provinsi
- t : Tahun
- e : *Error Term*

### 3.2.3 Pengujian Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Parsial (t-Statistik), dan Uji F-statistik.

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*Goodnes OfFit*) digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Menurut Gujarati (2003) dalam buku Ghozali (2009) menyimpulkan bahwa “Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen”.

#### b. Uji Parsial (t-statistik)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berdampak pada variabel dependen. Menurut Ghozali (2009) menyimpulkan bahwa pada tingkat  $\alpha = 5$  persen maka kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (dependent) secara signifikan.

- Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya salah satu variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen) secara signifikan

#### c. Uji F

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi tertentu.

Kriteria untuk pengujian ini adalah:

- F-stat < F-tabel, maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.
- F-stat > F-tabel, maka H0 ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto, 2010).

#### a. Variabel Dependen

Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran terdidik, yaitu seseorang yang termasuk angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dilihat dari tingkat pendidikan lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang dihitung dalam satuan persen pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

#### b. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Inflasi

Tingkat inflasi dilihat dari besarnya perubahan harga-harga yang berlaku secara umum berdasarkan Indeks Harga Konsumen yang dihitung dalam satuan persen pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari perhitungan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 per tahunnya yang dihitung dalam satuan milyar rupiah pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

3. Upah

Tingkat upah dilihat dari besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan bekerja atas dasar upah minimum provinsi (UMP) yang dihitung dalam satuan rupiah pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Hasil Estimasi**

**a. Uji Redundant Fixed Effect / Uji Chow**

Uji Chow untuk menentukan penggunaan metode *common effect* atau *fixed effect*, jika nilai probabilita (Prob) untuk *Cross-section*

*F* menunjukkan nilai besar >0.05 yang berarti H0 diterima maka model yang terpilih adalah *common effect*, tetapi jika < 0.05 yang berarti H0 ditolak H1 diterima maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Hasil uji redundant *fixedeffect* ini menunjukkan bahwa *Cross-section F* signifikan yaitu 0.000 Prob. kurang dari 5 persen sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, maka penelitian ini mengikuti model *fixed effect*.

**Tabel 5.1**  
**Uji Redundant Fix atau Uji F Chow**

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-Section F	6.870611	(15,76)	0.0000

Sumber: data diolah

**b. Uji Hausman**

Uji *Hausman* adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat untuk digunakan. Jika chi square ( $x^2$ ) hitung lebih besar dari chi square ( $x^2$ ) tabel, *p-value* signifikan, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima sehingga pendekatan yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan apabila chi square ( $x^2$ ) hitung lebih kecil dari chi square ( $x^2$ ) tabel, *p-value* signifikan maka pendekatan yang tepat adalah *Random Effect Model*. Hasil menunjukkan nilai statistik *Hausman* yaitu 16.826482 lebih besar dari distribusi chi square ( $\chi^2$ ) yaitu 7,815 dengan probability < 5 persen sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima dan mengindikasikan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik dari pada model *Random Effect*.

**Tabel 5.2**

### Uji Hausman

Test-Summary	Chi-Sq. Stat	Chi-sq. Df	Prob	Chi-Sq. Tabel
Cross section-random	16.826482	3	0.0000	7.815

Sumber: data diolah

**Tabel 5.3**  
**HASIL ESTIMASI**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.80885	6.646727	10.80364	0.0000
INF	0.044758	0.024096	1.857497	0.0071
LN (PDRB)	-1.478125	0.375372	-3.937764	0.0002
LN (UP)	-3.640634	0.479284	-7.595985	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C		3.506959		
_SUMUT—C		3.279389		
_SUMBAR—C		1.408280		
_LAMPUNG—C		-0.116618		
_DKI—C		5.357898		
_JABAR—C		4.977626		
_DIY—C		-3.105981		
_BALI—C		-2.908593		
_SULUT—C		1.157842		
_SULBAR—C		-5.415641		
_SULTRA—C		-3.053701		
_MALUKU—C		-0.805316		
_KALBAR—C		-1.425520		
_KALSEL—C		-0.608412		
_PABAR—C		-0.679541		
_PAPUA—C		-1.882405		

Sumber: data diolah

Pada nilai *fixed effect (cross)* untuk melihat bagaimana *effect* atau pengaruh dari masing-masing variabel pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nilai positif pada provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Utara menandakan bahwa masih ada variabel lain diluar model yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian.

## 5.2 Pengujian Statistik

### 5.2.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  dalam penelitian ini adalah 0.9107731, yang berarti bahwa 91,07 persen variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 8,93 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

### 5.2.2 Uji t-stat

Nilai t-statistik yang diperoleh dari hasil regresi kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel yaitu 1,66940 pada tingkat signifikansi persen.

**Tabel 5.4**  
**Perbandingan t-statistik dan t-tabel**

Variabel	T-statistic	T-tabel	H0	Keterangan
C	10.80364	1,66940	Ditolak	Signifikan
INFLASI	1.857497	1,66940	Ditolak	Signifikan
LN(PDRB)	-3.937764	1,66940	Ditolak	Signifikan
LN(UPAH)	-7.595985	1,66940	Ditolak	Signifikan

Sumber: data diolah

Hasil pengujian t-statistik terhadap model adalah sebagai berikut:

Diketahui bahwa variabel inflasi diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.857497. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (1.857497 > 1,66940) pada tingkat kepercayaan 91,07 persen sehingga  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai t-statistik untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -3.937764. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (-3.937764 > 1,66940) pada tingkat kepercayaan 91,07 persen sehingga  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Indonesia secara signifikan.

Yang ketiga variabel Upah adalah sebesar -7.595985. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (-7.595985 > 1,66940) pada tingkat kepercayaan 91,07 persen sehingga  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial mempengaruhi Pengangguran Terdidik secara signifikan.

### 5.2.3 Uji F-stat

**Tabel 5.5**  
**Perbandingan F-statistik dan F-tabel**

Df1	Df2	F-statistik		F-tabel	Kesimpulan
3	92	43.07575	5%	2,70	Signifikan

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai F-statistik sebesar 316.1891 lebih besar dari F-tabel pada tingkat kepercayaan 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 5.3 Implikasi Kebijakan Pemerintah Inflasi dan Pengangguran Terdidik

Inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan meningkatkan jumlah pengangguran terdidik. Inflasi yang terjadi di Indonesia relatif tinggi. Hal ini akan menyebabkan harga-harga melambung tinggi. Peningkatan terhadap harga-harga mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun bahkan sampai kadar tertentu peningkatan harga ini justru akan mengurangi penggunaan tenaga kerja

karena perusahaan akan memutuskan untuk mengurangi jumlah produksinya sehingga akan meningkatkan pengangguran.

Kebijakan yang telah diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga yang diharapkan agar masyarakat akan menabung di bank lebih banyak. Selain itu, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah penambahan hasil produksi. Untuk menambah hasil produksi, pemerintah dapat memberikan subsidi atau membuat peraturan yang mendorong perusahaan menjadi lebih produktif sehingga mampu menambah hasil produksi. Bertambahnya hasil produksi barang dan ataupun jasa diharapkan dapat mengimbangi jumlah uang beredar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terdidik**

Masalah pengangguran termasuk didalamnya pengangguran terdidik telah menjadi kondisi permasalahan yang cukup parah dan merupakan masalah yang serius dan menimbulkan implikasi serius. Untuk mengatasi pengangguran, cara utama adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar internasional.

Mengurangi jumlah pengangguran juga dapat dilakukan dengan menyumbangkan kewirausahaan. Kehadiran dan peranan para wirausaha akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Karena wirausaha akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan

dan memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas nasional baik sector formal maupun informal yang dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Memperluas lapangan pekerjaan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara pengembangan industry, terutama industri yang bersifat padat karya karena relatif dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan.

#### **Upah dan Pengangguran Terdidik**

Upah memiliki hubungan negatif dengan pengangguran terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan upah akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik. Tingkat upah dari setiap tenaga kerja selalu berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja (Samuelson, 1993). Perbedaan kualitas ini disebabkan oleh kemampuan fisik, tamatan pendidikan, pelatihan serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan serta pengalaman. Rendahnya tingkat pendidikan para tenaga kerja di Indonesia berpengaruh terhadap keahlian tenaga kerja dan hal ini merupakan hambatan tersendiri bagi para investor. Rendahnya keahlian ini dapat diatasi dengan menekankan pencapaian tujuan di bidang pendidikan formal dengan mereformasi sistem pendidikan. Di pihak lain, swasta dapat meningkatkan keahlian para pekerja dengan memberikan pelatihan formal bagi para pekerjanya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

- a. Nilai  $R^2$  dalam penelitian ini adalah 0.910731, yang berarti bahwa 91,07 persen variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 8,93persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.044758 dengan tingkat taraf nyata 1 persen. Artinya rata-rata penambahan inflasi sebesar 1persen akan meningkatkan jumlah pengangguran terdidik sebesar 0,045 persen. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negative dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -1.478125. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik sebesar 1,48 persen, yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Dan variable upah memiliki hubungan negative dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -3.640634 dengan tingkat taraf nyata 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan upah sebesar 1 rupiah akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik

sebesar 3,64 persen, yang berarti bahwa peningkatan upah akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik.

### Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai upaya untuk membantu mengatasi masalah pengangguran terdidik di Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Memperluas lapangan pekerjaan dapat mengurangi tingkat pengangguran.
2. Setiap provinsi hendaknya memberikan pelatihan dan perluasan terhadap tenaga kerja agar dapat mengurangi jumlah pengangguran terdidik.
3. Menyumbangkan kewirausahaan, karena wirausaha akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional baik sektor formal maupun informal yang dapat membantu penyerapan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alghofari, Farid. 2008. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Astuti, Wurdianti Yuli. 2014. *Pengangguran Terdidik di Perkotaan. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Dinarso, Jhondan Mark P. Moore.1999. *Analisis Hubungan Antara Pengangguran dan Inflasi dalam Perekonomian Terbuka dengan Menggunakan Data Panel*. Jurnal Ekonomi.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kaufman, Bruce E dan Julie L. Hotchkiss. 1999. *The Economics of Labor Markets*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1992. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1997. *Pengantar Makro Ekonomi. Jilid Dua*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. *Makroekonomi Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- McEachern, W. A. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muana, Nanga. 2001. *Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Murhadi, Werner R, (2015). *Panel Data With Eviews*. Wordpress.com Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.

Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental MakroEkonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Putri, Rizka Febiana. 2015. *Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Economics Development Analysis Journal. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.

Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 1992. *Makro Ekonomi Edisi XIV*. Jakarta: PT Erlangga.

Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia; Edisi ke 2*. Jakarta: LPFE UI.

ukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: FE UI.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori Dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutomo, dkk. 1997. *Profesi Kependidikan*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.

Suyuthi, M. Djamil. 1989. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: P2LPTK.

Tjiptoherijanto, Priyono. 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa.

Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ke 8*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1990  
Website Badan Pusat Statistik